

SKRIPSI
KINERJA ANGGOTA DPRD PEREMPUAN KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2019-2024



Disusun dan Diajukan oleh

ANWAR. S

E 11116311

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**KINERJA ANGGOTA DPRD PEREMPUAN KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2019-2024**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Disusun dan diajukan oleh:

**ANWAR. S
E11116311**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**KINERJA ANGGOTA DPRD PEREMPUAN KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019-
2024**

Di susun oleh :

ANWAR. S

E11116311

Dinyatakan memenuhi syarat dan siap diperhadapkan dengan tim penguji

Pada tanggal : 3 Agustus 2023....

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si
NIP. 197308131998022001

Pembimbing II



Haryanto, S.IP., M.A
NIP. 198610082019031009

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H.A. Yakub, M.Si. P. hD
NIP. 19621231 199003 1023

HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI
KINERJA ANGGOTA DPRD PEREMPUAN KABUPATEN TAHUN 2019-
2024

Disusun dan Diajukan Oleh :

ANWAR. S


E11116311

Dan dinyatakan telah memenuhi Syarat oleh Panitia Ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin


Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si. (.....)

Sekretaris : Haryanto, S.IP. M.A. (.....)

Anggota : Dr. Imran, S.IP., M.Si. (.....)

Anggota : Umami Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar. S

NIM : E11116311

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Kinerja Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2023



ANWAR S

ABSTRAK

ANWAR. S. NIM E11116311. Kinerja Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024. Di bawah bimbingan Ibu Gustiana A. Kambo dan Bapak Haryanto.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai fungsi mewakili kepentingan masyarakat apabila berhadapan dengan pihak Eksekutif maupun pihak lain. Terdapatnya perempuan di jajaran anggota DPRD Kabupaten Pinrang tidak otomatis menjamin aspirasi kaum perempuan akan terakomodasi dengan lebih baik, dikarenakan suara perempuan di parlemen bukan suara individu melainkan parpol dan fraksi. Dalam perspektif gender, harapan partisipasi mereka sebagai penguatan peran politik perempuan adalah untuk memperjuangkan kepentingan perempuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kinerja DPRD Perempuan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data diolah dari hasil pengamatan dan wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Pinrang. Objek dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Pinrang. Pengukuran Kinerja Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Pinrang dilakukan dengan indikator Responsivitas, Akuntabilitas, dan Afektivitas, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Anggota Dprd Perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator Responsivitas, Akuntabilitas dan Efektifitas. Belum maksimalnya kinerja Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Pinrang ini dikarenakan belum mampunya Anggota DPRD Perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dimana hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perda yang dihasilkan mengenai kepentingan perempuan. Dengan memakai 3 indikator tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 belum optimal maka dirasa perlu evaluasi dalam peningkatan kinerja.

Kata Kunci : Kinerja, Anggota DPRD Perempuan.

ABSTRACT

ANWAR. S. NIM E11116311. Performance of Women Legislators of Pinrang Regency in 2019-2024. Under the guidance of Mrs. Gustiana A. Kambo and Mr. Haryanto.

The Regional People's Representative Council as an element of organizing Regional Government has the function of representing the interests of the community when dealing with the Executive and other parties. The presence of women in the ranks of Pinrang Regency DPRD members does not automatically guarantee that women's aspirations will be better accommodated, because women's voices in parliament are not individual voices but political parties and factions. From a gender perspective, the expectation of their participation as a strengthening of women's political role is to fight for women's interests.

The purpose of this research is to know and describe the Performance of the Performance of Women's DPRD Pinrang Regency 2019-2024. The data used in this research are primary and secondary data. The data is processed from observations and interviews with members of the Pinrang Regency DPRD. The object of this research is female members of the Pinrang Regency DPRD. Measurement of the performance of female members of the Pinrang Regency DPRD is carried out with indicators of Responsiveness, Accountability, and Effectiveness, as well as factors that become obstacles for female DPRD members in fighting for the interests of women.

The results of this study indicate that the performance of female members of the Pinrang Regency DPRD in 2019-2024 has not been maximized. This can be seen from the Responsiveness, Accountability and Effectiveness indicators. The performance of female members of the Pinrang Regency DPRD has not been maximized due to the inability of female DPRD members to fight for women's interests, which can be seen from the absence of local regulations produced regarding women's interests. By using these 3 indicators, it can be said that the performance of the 2019-2024 Pinrang Regency Women DPRD Members is not optimal, so it is necessary to evaluate in improving performance.

Keywords: Performance, Female DPRD Members

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah *rabbi* *lamin* Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala keberkahan, karuniah serta nikmat kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Kinerja Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024”**. Salam dan shalawat juga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi panutan penulis menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Banyak rintangan dan tantangan yang penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini namun berkat segala bantuan tenaga dan doa dari semua pihak yang menemani perjalanan penulis, sehingga skripsi ini terselesaikan. Maka pada kata pengantar ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat tanpa terkecuali.

Selain itu terimakasih yang setinggi-tingginya penulis tujukan kepada kedua orang tua penulis, **Abdussamad dan P.tammelle** yang telah memberikan kasih sayang yang begitu tulus. Skripsi ini penulis persembahkan kepada dua mukjizat yang tuhan kirimkan kepada penulis melalui sosok orang tua yang senantiasa menjadi peluk terhangat bagi penulis. Dua orang malaikat gagah dan cantik yang tak pernah berhenti memberikan dukungan moral dan material yang tak lupa diiringi do'a disetiap sujudnya. Kepada kakak tercinta, kak Rusman dan Kak Juhani, kak Tamrin dan kak Rusni, kak Syahrir dan kak Nuraeni, Kak Fahrudin, tidak lupa untuk adik satu-satunya Abdul Hafid, terimakasih atas segala dukungan moral serta material selama ini. Semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kedua orang tua dan juga kepada semua keluarga besar penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si selaku penasehat akademik (PA) sekaligus dosen pembimbing 1 dan Bapak Haryanto, S.IP, M.A. selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si**, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
4. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : **Bapak Prof. Dr. Muh, Kausar Bailusy, MA (Alm), Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm), Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus M.Si, Bapak Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Kakak Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, Kakak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Kakak Dian Ekawati, S.IP, M.Si** yang telah

memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

5. Seluruh pegawai dan staf fakultas serta staf dan pegawai departemen ilmu politik yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
6. Terima Kasih untuk Informan utama penulis **Ibu Herly Lukman, Ibu Hj. Salmah, Ibu Ratna Arifin, Ibu Hj. Rusnah, Ibu Hj. Andi Pajjai Makka dan Bapak Andi Dani** yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan sebagai anggota DPRD Kabupaten Pinrang.
7. Terima kasih untuk keluarga besar **KMP Unhas** telah menjadi menjadi rumah dan tempat belajar serta memberikan penulis keluarga baru di Makassar.
8. Terima kasih untuk keluarga besar **Himapol FISIP Unhas** yang telah memberikan pengalaman luar biasa kepada penulis selama berorganisasi di kampus.
9. Kepada teman-teman **Ilmu Politik 16** yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
10. Kepada saudara saudariku **Reformasi16**. Kalian telah menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan penulis didunia kampus.
11. Kepada teman-teman **Pripol**, terimakasih atas segala bantuannya selama ini.

12. Kepada teman-teman **CREW 16, KKN Posko Desa Batulohe Gel 102, Bikin Apa Malam Ini, Pemadam Kelaparan**, terimakasih atas canda, tawa, duka, serta semua pelajaran hidup yang penulis dapatkan.

13. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kakak **Arfandi A. Tjenne dan Arifuddin Patawari** yang tidak pernah lelah berbagi ilmu kepada penulis dan sangat sabar hingga tak jera menasehati penulis ditengah-tengah kesibukannya, tanpa bantuan besar dari mereka, mungkin saja penulis akan sangat sulit sampai pada tahap ini

Selebihnya terimakasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan satu persatu. Sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai sejarah dalam penulis menjadi mahasiswa. Akhirnya penulis menyadari atas segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 29 Juli 2023

Penulis

ANWAR. S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
PENYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Literatur Review	10
2.2 Tinjauan Teoritis.....	13
1. Feminisme	13
2. Konsep Kinerja.....	17
2.3 Kerangka Pemikiran	22
2.4 Kerangka Pikir.....	23

BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Tipe dan Jenis Penelitian	24
3.2 Lokasi Penelitian.....	25
3.3 Informan Penelitian.....	25
3.4 Jenis dan Sumber Data	25
3.4.1 Data Primer	26
3.4.2 Data Sekunder	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5.1 Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)	27
3.5.2 Arsip/Dokumen	27
3.6 Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	29
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pinrang	29
4.1.1 Sejarah Kabupaten Pinrang.....	30
4.2 Gambaran Umum Pemilihan Legislatif Kabupaten Pinrang tahun 2019	32
4.2 Gambaran Umum DPRD Kabupaten Pinrang.....	36
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
5.1 Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Pinrang.....	40
5.2 Kinerja Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Pinrang	43
5.2.1 Responsivitas.....	46
5.2.2 Akuntabilitas	51
5.2.3 Efektifitas.....	56
5.3 Faktor Penghambat Kinerja Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Pinrang Periode 2019-2024.....	62

BAB VI PENUTUP	67
6.1 KESIMPULAN	67
6.2 Saran.....	69
Daftar Pustaka	70
DOKUMENTASI	72

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pembagian Dapil di Kabupaten Pinrang

Tabel 4.2 Daftar nama Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Pinrang

Tabel 4.3 Daftar nama Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Pinrang

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Kabupaten Pinrang tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada realita politik kontemporer, kesetaraan dan kesenjangan gender di dalam politik merupakan sebuah tantangan global yang terus dihadapi oleh masyarakat dunia hingga saat ini. Persoalan eksistensi dan keterwakilan perempuan didalam proses pembuatan kebijakan merupakan salah satu faktor utama permasalahan tersebut. Sistem demokrasi yang berkembang di banyak negara saat ini, secara luas menormakan politik untuk mampu melibatkan dan mengikutsertakan peran dan partisipasi perempuan pada setiap proses didalamnya. Atas dasar tersebut, demokrasi yang idealnya mengutamakan terwujudkannya kekuasaan di tangan rakyat diharapkan untuk mampu mengatasi persoalan struktural ketidaksetaraan kuasa yang serius di dalam lapisan masyarakat.

Indonesia adalah negara penganut sistem demokrasi. Kondisi tersebut merepresentasikan proses demokrasi yang memungkinkan hadirnya pihak wakil dan terwakili dalam segala proses politik. Meskipun dalam realitanya, keadaan ini tidak sepenuhnya mewakili seluruh lapisan individu padahal proses dari keterwakilan ini merupakan cita-cita serta aspirasi akan menentukan arah sebuah kebijakan itu sendiri. dilain hal demokrasi dalam penerapannya, mestinya memberikan berbagai hak dan kebebasan baik itu seperti hak hidup, ataupun hak berpendapat.

Penerapan demokrasi kemudian turut mengalami perkembangan dan berbagai transisi perubahan. Hal tersebut tentu sangat beralasan,

guna memastikan memastikan dan mengupayakan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan politik. Seperti pemilu, parpol, dan kelembagaan oprasional lainnya. Salah satu tantangan terbesar di Indonesia dalam pelaksanaan proses demokrasi yaitu kesetaraan gender, dimana partisipasi serta keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi dinilai masih sangat minim. Melihat perjalanan pelaksanaan demokrasi, keterwakilan perempuan dalam bidang parlemen tidak pernah melebihi angka 18 persen di DPR. Permasalahan mendasar dalam hal ini adalah masih besarnya citra yang melekat didalam masyarakat bahwasanya perempuan itu hanyalah mahluk yang lemah dan tidaklah pantas untuk masuk dalam ranah publik. Hal ini diperparah dengan adanya budaya patriarki dan nilai-nilai sosial di Indonesia yang menuntut perempuan untuk untuk tidak berpartisipasi di ranah politik karena anggapan laki-laki yang semestinya memegang kendali dalam hal kepemimpinan.

Perjuangan kesetaraan gender adalah salah satu upaya mewujudkan demokratisasi karena dengan adanya kesetaraan gender maka seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan masing-masing memiliki dan mempunyai akses untuk melakukan proses demokratisasi itu sendiri. Hasil perjuangan perempuan untuk masuk ke dalam ranah publik berawal dari aksi solidaritas Perempuan sebagai organisasi feminis. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, dengan prinsip-prinsip keadilan, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan kekerasan, dengan berdasarkan

pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara. Dimana titik tolak dari perjuangan ini adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan perwujudan masyarakat yang demokratis, adil, makmur, damai dan sejahtera. Dengan tujuan tersebut diatas diharapkan terciptanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia itu sendiri, tanpa harus membedakan latar belakang sosial dan budayanya.

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan kesepakatan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 45 Pasal 27. Namun demikian, dalam perkembangannya, beberapa UU yang selama ini berlaku di Indonesia, disadari mempunyai arti yang masih diskriminatif terhadap perempuan. Seperti dalam undang-undang mengenai sistem pengupahan tenaga kerja perempuan, tunjangan keluarga dan tunjangan kesehatan-perempuan dianggap lajang sehingga suami dan anak-anak tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana yang diterima pekerja laki-laki.¹

Berbicara tentang perempuan tidak dapat terlepas dari peran dan kedudukannya dalam masyarakat, apalagi dikaitkan dengan masalah politik. Dalam konteks politik, peran dan posisi kaum perempuan cukup kentara mengalami diskriminasi, masalah peran dan posisi kaum perempuan di wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak asasi yang setiap manusia berhak memilikinya. Namun yang cukup ironis, kaum perempuan justru banyak yang belum memahami tentang hak-hak

¹ Wery Gusmansyah, "Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia", *urnal Hawa* Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019, Hal. 159.

mereka. Politik Indonesia yang masih sarat dengan diskriminasi gender. Harus diakui bahwa kaum perempuan di Indonesia, yang merupakan mayoritas, masih buta terhadap wacana politik. Peran dan posisi mereka di wilayah pengambil kebijakan masih sangat minim. Bahkan, terdapat stigma yang menempatkan peran dan posisi kaum perempuan amat disepelekan.²

Keterwakilan perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya Undang-Undang Pemilu No. 12 Tahun 2003, yang menyebutkan pentingnya aksi afirmasi (affirmation action) bagi partisipasi politik perempuan dengan menetapkan jumlah 30% dari seluruh calon partai politik pada parlemen di tingkat nasional maupun lokal. Aksi afirmasi seringkali didefinisikan sebagai upaya strategis untuk mempromosikan kesamaan dan kesempatan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat seperti perempuan atau kelompok minoritas yang kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan.³

Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang no. 8 tahun 2010 pasal 53 sampai pasal 58 yang menyangkut sistem kuota 30% bagi perempuan. Dan yang terbaru pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 pasal 55 yang berbunyi, "Daftar bakal calon sebagaimana psal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Serta pasal 56 ayat 2 yang juga menguatkan keberadaan perempuan di kancah

² Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender", Jurnal Politik Islam Vol. 1 No. 1 (Jan-Jun) 2018, Hal. 65.

³ Nurul Asnawiah dan Titin Purwaningsih " Analisis Representasi Substantif Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019" Jurnal Caraka Prabu Vol. 4 No. 1 Juni 202, Hal. 2.

politik yang berbunyi, “Daftar bakal calon sebagaimana pada ayat 1, setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon.”⁴

Harapannya dengan kebijakan tersebut dapat menjadi kemajuan partisipasi politik perempuan dari segi kuantitasnya sehingga tercapai angka proposional keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif juga partai politik, dari segi kualitasnya adalah harapan agar suara dan kepentingan perempuan akan lebih diakomodir dalam setiap pengambilan keputusan suatu kebijakan disaat masih banyaknya permasalahan yang dialami perempuan dan kepentingan perempuan serta kebutuhan perempuan yang belum terpenuhi. Kebutuhan untuk meningkatkan representasi politik perempuan di Indonesia baik ditingkat pusat maupun lokal berpangkal dari suatu kesadaran bahwa semua prioritas dan agenda politik harus dirombak dan semua ini harus didukung oleh elit partai politik dan sistem pemilu yang ramah terhadap perempuan. Meningkatkan representasi politik perempuan berarti juga meningkatkan keefektifan perempuan dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dapat menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat luas.⁵

Dengan perangkat hukum yang telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan diatas, kesempatan perempuan untuk masuk dalam bidang politik sebenarnya sangat memungkinkan namun masih ada faktor yang menghambat perempuan untuk masuk dalam panggung perpolitikan,

⁴ Nurul Asnawiah dan Titin Purwaningsih “ *Analisis Representasi Substantif Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019*” Jurnal Caraka Prabu Vol. 4 No. 1 Juni 202, Hal. 2.

⁵ *Ibid.*

yaitu pandangan atau stereotip yang menempatkan perempuan rendah bahkan dikatakan *The second human being* (manusia kelas dua) yang berada di bawah superioritas laki-laki yang membawa implikasi luas dalam kehidupan sosial di masyarakat, hal ini dikarenakan masih lekatnya budaya patriarkhi di Indonesia yang memposisikan perempuan pada peran-peran domestik seperti peran pengasuhan, pendidik, dan penjaga moral.

Secara kuantitas representasi perempuan dalam arena politik khususnya di lembaga legislatif mengalami pasang surut sejak tahun 1950. Persentase perolehan kursi perempuan pada pemilu 2019 mengalami peningkatan yakni mencapai 20,35 persen, apabila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya pada tahun 2014 yang hanya mampu mencapai angka 17,32 persen. Selain itu, perolehan kursi perempuan per partai (partai yang lolos *Parliamentary Threshold*) dalam pemilu 2019 tampaknya menunjukkan tren yang cukup variatif apabila dibandingkan dengan hasil pemilu 2014.⁶

Dalam konteks lokal di Kabupaten Pinrang, Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Pinrang telah menetapkan 40 (empat puluh) nama yang terpilih menjadi anggota legislatif kabupaten Pinrang. Diantara 40 (empat puluh) nama yang terpilih, ada enam perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif Kabupaten Pinrang. Hal ini kemudian menggambarkan keterwakilan perempuan dalam legislatif Kabupaten Pinrang, dimana pada

⁶ Arsito " *Representasi Politik Perempuan dalam Lembaga Legislatif Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada PEMILU Legislatif Tahun 2019*" *Jurnal Sosial Politik Humaniora* Vol. 9 No. 2 Juli 2021, Hal. 18.

pemilihan legislatif kabupaten pinrang tahun 2014-2019 sebelumnya, keterwakilan perempuan masih sedikit dimasa itu, perempuan yang terpilih hanya tiga orang perempuan, sedangkan pada pemilihan 2019-2024, terdapat enam orang perempuan yang berhasil terpilih. Peningkatan keterpilihan perempuan pada pemilihan legislatif 2019-2024 Kabupaten Pinrang meningkat 100% dari pemilihan sebelumnya.

Bisa dikatakan pemilihan legislatif Kabupaten Pinrang tahun 2019, menjadi panggung politik bagi perempuan dalam kontestasi politik, hal ini tidak lepas dari aturan yang memberikan syarat kepada partai politik yang mengikuti kontestasi pemilihan legislatif Kabupaten Pinrang mengenai 30% keterwakilan perempuan.

Terdapatnya perempuan di jajaran anggota DPRD Pinrang tidak otomatis menjamin aspirasi kaum perempuan akan terakomodasi dengan lebih baik, dikarenakan suara perempuan di parlemen bukan suara individu melainkan parpol dan fraksi. Dalam perspektif gender, harapan partisipasi mereka sebagai penguatan peran politik perempuan adalah untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Sebab ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan yang masih terjadi hingga saat ini seperti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dan pelecehan seksual, masalah kesehatan, diskriminasi diberbagai lingkup penghidupan, upah pekerja perempuan yang minim dan lebih rendah dari upah pekerja laki-laki, atau masalah kesejahteraan keluarga, kesehatan reproduksi dan masih banyak kepentingan perempuan lainnya yang menjadi isu-isu

perempuan yang harus diupayakan secara politis sebagai masalah gender.

Berangkat dari fenomena tulisan diatas, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kinerja Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang diatas, peneliti membatasi rumusan masalah tersebut, yakni bagaimana respon anggota DPRD perempuan Kabupaten Pinrang dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dan hal-hal apa yang menjadi penghambat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Kinerja dan hambatan Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh setelah dilakukannya penelitian ini, ada dua aspek yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Menjawab Fenomena Sosial Politik terkait Kinerja dan Hambatan Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024.
- b) Menunjukkan Secara ilmiah keterwakilan perempuan khususnya di legislatif Kabupaten Pinrang.

- c) Memperkaya khasanah kajian Ilmu politik untuk perkembangan keilmuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Memberikan bahan rujukan bagi yang berminat dalam memahami Keterwakilan perempuan dalam legislatif Kabupaten Pinrang.
- b) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Keterwakilan perempuan dalam legislatif Kabupaten Pinrang.
- c) Salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan menguraikan tentang konsep, teori dan pendekatan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Terkait dengan “Kinerja Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024” yang menjadi landasan kerangka berfikir dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilanjutkan.

2.1 Literatur Review

Penelitian terdahulu ini dapat menjadi salah satu acuan atau referensi penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperluas teori-teori yang akan digunakan untuk memperdalam bahan kajian dan pembahasan pada penelitian ini. Adapun beberapa dari penelitian terdahulu ialah sebagai berikut:

Terdapat Terdapat 2 literatur yang penulis jadikan acuan dalam karya tulis ini, yaitu pertama tulisan yang berjudul Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan dan Prakteknya di Indonesia, Mudiwati Rahmatunnisa mengatakan bahwa perdebatan yang muncul di dalam level internasional mengenai penghapusan diskriminasi perempuan menghasilkan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).⁷ Dengan adanya kehadiran konvensi ini diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki di ranah politik dan kehidupan publik termasuk hak untuk memilih ataupun

⁷ Paper “*Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan dan Prakteknya di Indonesia*” disampaikan pada Seminar pendidikan politik bagi remaja perempuan oleh Mudiwati Rahmatunnisa, Sabtu, 25 Januari 2014, Cibitung Bekasi.

mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Dalam implementasi kebijakan dibutuhkan langkah–langkah strategis. Pertama, memanfaatkan partai politik sebagai penjaga pintu utama terjadinya demokrasi di masyarakat dengan secara konsisten mengadopsi kuota perempuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kedua, pemberian pelatihan dan pendidikan politik guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan sehingga perempuan mempunyai kedudukan yang setara dengan laki–laki. Ketiga, melalui kampanye publik guna memperlancar mobilisasi jejaring organisasi perempuan. Menurut Mudyati, melalui Konvensi CEDAW ini dapat pula digunakan untuk memperbaiki dan mengkaji dampak yang ditimbulkan akibat partisipasi politik perempuan serta memonitor perkembangan agenda politik di kehidupan sehari–hari.

Peran politik sendiri sangat berhubungan dengan struktur sosial, sehingga perempuan selain mampu bersaing dengan laki–laki dalam perebutan kursi di ranah politik, diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perubahan struktur sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Banyak dari perempuan–perempuan yang meragukan antara kedudukan dan peranan mereka. Kedudukan perempuan masih terbilang abu–abu karena berbagai alasan yang telah merekat di masyarakat seperti, perempuan dianggap tidak siap dalam memegang posisi tertentu yang tergolong tinggi karena dianggap tidak mampu dan lemah dalam memimpin. Sifat emosional perempuan turut dijadikan alat untuk melakukan pembenaran terhadap perilaku yang tidak adil yang menimpa para perempuan tersebut. Kaum perempuan sendiri jika dikatakan masih

belum menyepakati apa yang menurut mereka harus diperjuangkan sehingga banyak perempuan di luar sana yang sudah merasa cukup dengan peran yang dijalankan sekarang tanpa mempersoalkan mengenai kedudukan mereka. Padahal dunia membutuhkan perempuan, khususnya di dunia politik, yang seringkali dikuasai oleh para laki-laki yang menjadi saingan utama.

Kemudian yang terakhir yaitu sebuah jurnal berjudul Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia oleh Erlina, mengatakan bahwa banyak dari perempuan di dunia yang mengalami pelanggaran akan hak asasinya seperti kekerasan fisik maupun psikis, diskriminasi, kemiskinan dan pendidikan yang rendah.⁸ Banyak saran yang berdatangan guna menjadikan perjanjian ini sebagai salah satu instrumen yang mendukung keberhasilan menyetarakan kembali kedudukan perempuan dan laki-laki. Seperti, transparansi informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, adanya pengajaran dan pendidikan mengenai gender dapat membantu merubah pandangan negative masyarakat mengenai perempuan dan upaya mengawasi kebijakan mengenai penghapusan diskriminasi ini harus dilakukan secara rutin dan melibatkan organisasi-organisasi perempuan.

Sedangkan pada penelitian ini berfokus terhadap kinerja anggota DPRD Perempuan Kabupaten Pinrang periode 2019-2024, dimana kinerja anggota DPRD Perempuan kabupaten Pinrang dapat dilihat terhadap

⁸ Erlina, 2012, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol.I No. 1 November 2012, hlm. 1.

kebijakan perundang-undangan yang dibuat oleh anggota DPRD Kabupaten Pinrang terkait keterwakilan dan respon mereka dalam memperjuangkan kepentingan perempuan yang dibuat dalam perundang-undangan .

2.2 Tinjauan Teoritis

1. Feminisme

Secara etimologis feminis berasal dari kata *Femme* (*women*), feminisme adalah gerakan wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarjinalisasikan, disubordinasikan dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun kehidupan social pada umumnya. Menurut Moeliono dalam Suharti dan Suharto Feminisme adalah gerakan kaum perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan kaum laki-laki.⁹ Paradigma teori feminis, menurut Anwar secara umum mengarahkan perhatiannya pada analisis terhadap berbagai relasi-relasi kekuasaan dan jalan yang dilakukan oleh wanita baik secara individual maupun sebagai anggota dari kelompok subordinat untuk bernegosiasi. Secara garis besar tujuan dari pendekatan feminis adalah meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan (wanita) agar sama atau sejajar dengan kedudukan serta derajat laki-laki. Oleh karena itu feminis hendaklah

⁹ Didah Nurhamidah "Pergulatan Ibu dan Gadis Kecil Miskin dalam Meraih Pendidikan (Sebuah Pendekatan Feminisme dalam Novel *Ma Yan*") Jurnal Sasindo Unpam, Vol, 4, No. 1 Juni 2016, hal. 3.

dapat membantu kita memahami, menafsirkan dan menilai karya-karya rekaan penulis wanita itu sendiri.¹⁰

Teori feminis merupakan suatu teori tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia ditinjau dari perspektif wanita. Teori feminis memusatkan perhatiannya pada tiga hal; *pertama*, objek utama kajiannya adalah situasi dan pengalaman wanita dalam masyarakat; *kedua*, membicarakan wanita sebagai subjek utama dalam proses kajiannya; dan *ketiga* teori ini kritis dan aktif membela wanita, berusaha menghasilkan dunia yang lebih baik untuk wanita pada khususnya dan manusia pada umumnya.¹¹

Feminisme mendorong gerakan sosial untuk memperjuangkan status perempuan, artinya sifatnya sangat politis dan tidak akademis. Sifat politis feminisme dianggap sebagai sebuah perspektif yang sangat berpihak pada perempuan dan sangat subjektif. Hal ini bertentangan dengan syarat ilmu pengetahuan yang diakui selama ini: objektivitas. Kritik terhadap feminisme kemudian muncul dengan argumen, “teori feminis hanya dapat digunakan oleh perempuan feminis. Laki-laki dan perempuan yang tidak feminis tidak dapat menggunakannya.”¹²

¹⁰ Didah Nurhamidah “Pergulatan Ibu dan Gadis Kecil Miskin dalam Meraih Pendidikan (Sebuah Pendekatan Feminisme dalam Novel Ma Yan)” Jurnal Sasindo Unpam, Vol, 4, No. 1 Juni 2016, hal. 3.

¹¹ Ida Hidayatul Aliyah dkk, 2018, *Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah*, Jurnal Pembangunan Sosial Vol 1 No. 2 Tahun 2018, hlm. 2.

¹² Marianna Amiruddin. “Feminisme: Ilmu Pengetahuan Kebenaran”. *Yayasan Jurnal Perempuan*, 48 (Juli, 2006): h. 19.

Feminisme merupakan ideologi yang terbangun karena adanya kesadaran dan pengakuan pengalaman atas penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan secara universal dan sistematis. Selain itu, feminisme juga mengandung kesadaran akan keberagaman situasi perempuan dan identitas perempuan yang berlapis.¹³

Pada analisis feminis, menggunakan analisis interseksionalitas untuk melihat berbagai lapisan identitas yang melekat pada perempuan, serta dampaknya terhadap perempuan. Interseksionalitas adalah lapisan identitas perempuan seperti kelas ekonomi, kelas sosial, latar belakang pendidikan, status perkawinan, orientasi seksual, orientasi politik, ras, dan lain sebagainya yang menghasilkan kompleksitas persoalan perempuan serta kerentanan yang berbeda. Tak hanya melihat hukum dan instrumen internasional yang ada, tapi juga melihat apa yang ada di balik hukum, yaitu apa sistem sosial, politik dan ekonomi yang menopang hukum dan praktik diskriminatif yang meminggirkan perempuan. Sehingga kerangka feminis juga menanamkan komitmen terhadap solidaritas dan membangun gerakan untuk perlindungan hak hingga pada perubahan struktural atau kebijakan.¹⁴

¹³ Andriyeni dkk, *Catatan Akhir Tahun Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan 2020*. Jakarta : Solidaritas Perempuan, 2020, hal. 9.

¹⁴ *Ibid*

Feminisme menggunakan gender sebagai kunci melihat pengaruh dari sistem yang dianut oleh masing–masing negara dan perekonomian global dalam upaya melihat perbedaan kehidupan yang dijalani oleh perempuan dan laki–laki, juga menjelaskan apa yang seharusnya perempuan dan laki–laki dapatkan. Feminisme telah memperbaiki visibilitas perempuan, meneliti konstruksi konsep gender dan kebijakan internasional serta mempertanyakan pembagian gender yang membentuk dan dibentuk oleh kehidupan politik global.

Paham feminisme selanjutnya menjadi sebuah perjuangan bagi kaum perempuan, dengan tujuan untuk tercapainya emansipasi dan hak-hak wanita dalam variabel pembangunan, serta dalam lingkup kekuasaan atau politik yang selama ini senantiasa didominasi oleh kaum pria saja. Hal ni terjadi disebabkan oleh kehidupan kekuasaan, banyak mendeskripsikan politik (kekuasaan) pria. Perempuan senantiasa dianggap kaum yang berada di bawah laki-laki. Sehingga ruang gerak dan hak-hak yang dimiliki oleh perempuan menjadi sempit dan terbatas. Feminisme dalam paham politik adalah artikulasi kekuasaan dalam masyarakat. karena artikulasi kekuasaan itu telah berlangsung di mana-mana, maka politik juga menembus kaum feminisme sehingga metodologi politik juga menembus gerakan politik wanita.

2. Konsep Kinerja

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata *performance*. *Performance* dari kata *to perform* yang mempunyai masukan (*entries*): (1) melakukan, (2) memenuhi atau menjalankan sesuatu, (3) melaksanakan suatu tanggungjawab, dan (4) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang. Kinerja adalah suatu hasil dimana orang atau sumber-sumber dan pada lingkungan kerja tertentu secara bersama membawa hasil akhir yang didasarkan tingkat mutu standard yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu kinerja pada dasarnya akan sangat tergantung dan ditentukan oleh beberapa aspek dalam melaksanakan pekerjaan antara lain; kejelasan peran (*roleclarify*), tingkat kompetensi (*competencies*), keadaan lingkungan (*environment*), dan faktor lainnya seperti nilai (*value*), budaya (*cultur*), kesukaan (*preference*), imbalan dan pengakuan (*reward and recognitions*). Pendekatan mengetahui kinerja dilihat melalui rencana strategis yang bersifat lebih politis kebijakan manajemen aparatur yang efektif dan efisien dapat mendukung terciptanya *good government* dalam meningkatkan kinerja. Pengertian lainnya, kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan .

Menurut Eko Maulana Istilah kinerja dan penggunaannya saat ini semakin populer, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga

diberbagai negara. Seiring dengan perubahan paradigma dalam pengelolaan organisasi, baik publik atau privat dalam upaya mencapai tujuan, maka persoalan kinerja menjadi suatu yang sangat penting sekaligus krusial. Melalui indikator dan ukuran kinerja yang tepat, pencapaian tujuan organisasi akan lebih mudah dinilai, dievaluasi dan dipertanggungjawabkan.¹⁵

Lebih lanjut, Menurut Pasalong konsep kinerja pada dasarnya dilihat dari dua segi, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah kinerja perseorangan dalam organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Kinerja individu dan organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan oleh individu yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi.¹⁶

Menurut Mahmudi Penilaian kinerja DPRD merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atau efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan perda serta kualitasnya dalam perbandingan hasil kerja dengan target dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan. Penilaian kinerja

¹⁵ Alfridus S. D, "Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Kupang Periode 2014-2019", Jurnal Jurusan Ilmu Politik, Volume 8 No. 2 Tahun 2019, Hal. 7.

¹⁶ *Ibid.*

adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai atau mengetahui apakah seorang anggota DPRD telah melaksanakan pekerjaannya dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Pada hakikatnya penilaian kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap penampilan kerja individu (personel) dengan membandingkan pada standar baku penilaian untuk DPRD.¹⁷

Menurut Pasalong pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Menurut Achmad Amins Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Berkaitan dengan mengukur atau mengetahui kinerja suatu lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat dikatakan berhasil, maka perlu suatu pembuktian secara nyata terlebih dahulu, yaitu dengan melihat *input, process, output* dan mendapatkan *outcome* serta manfaat yang memuaskan baik dari dalam lembaga sendiri maupun dari luar lembaga serta mendapat legitimasi dari masyarakat luas. Namun kinerja lembaga tersebut dapat juga semakin menurun

¹⁷ Alfridus S. D, "Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Kupang Periode 2014-2019", Jurnal Jurusan Ilmu Politik, Volume 8 No. 2 Tahun 2019, Hal. 7.

dikarenakan faktor internal seperti kekurangan anggaran, sarana pra sarana, kualitas SDM dan dukungan teknologi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam lembaga/organisasi. Selain itu faktor eksternal juga dapat mempengaruhi kinerja lembaga/organisasi seperti banyak campur tangan atau intervensi dari pihak-pihak luar yang merasa dirugikan atau terancam oleh kehadiran lembaga tersebut dengan reputasi kinerja yang sangat baik.¹⁸

Sementara menurut McDonald & Lawton dalam Ratminto & Atik Septi Winarsih, untuk mengukur kinerja dapat dilihat dari aspek efisiensi, dan efektivitas suatu organisasi. Dari berbagai pendapat dan penjelasan dari para ahli di atas, mengenai bagaimana mengukur kinerja, maka penelitian ini menggunakan ukuran kinerja organisasi untuk mengukur sejauhmana kinerja politisi perempuan di DPRD, yang tentu saja dalam penentuan ukuran tersebut disesuaikan dengan tujuan dan visi misi organisasi yang berhubungan pada: responsivitas, akuntabilitas, dan efektivitas. Untuk memperjelas penggunaan indikator tersebut, berikut dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan teori dan konsep dari masing-masing indikator adalah:

¹⁸Alfridus S. D, "Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Kupang Periode 2014-2019", Jurnal Jurusan Ilmu Politik, Volume 8 No. 2 Tahun 2019, Hal. 7.

a) Responsivitas

Tingkat responsivitas yang akan diteliti adalah kemampuan politisi perempuan dalam mengenali kebutuhan masyarakat, merespon persoalan yang muncul, dan memahami kemauan masyarakat untuk kemudian dikembangkan dan dituangkan dalam kebijakanyang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakat, terutama berkaitan dengan kaum perempuan.

b) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu indikator untuk mengukur kinerja politisi perempuan untuk melihat seberapa besar kegiatan pelaksanaan peran dan fungsi yang berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan politik (kebijakan).

c) Efektivitas

Efektivitas disini akan diukur dari apakah dengan adanya politisi perempuan di lembaga perwakilan dapat sebagai penyambung aspirasi masyarakat daerah dalam melaksanakan peran dan fungsi yang diembannya.¹⁹

¹⁹ Yuliasuti Wulandari, "Kinerja Politisi Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin Tahun 2014-2016" Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Tahun 2016, Hal. 6.

2.3 Kerangka Pemikiran

Terdapatnya perempuan di jajaran anggota DPRD Pinrang tidak otomatis menjamin aspirasi kaum perempuan akan terakomodasi dengan lebih baik karena suara perempuan di parlemen bukan suara individu melainkan parpol dan fraksi. Dalam perspektif gender, harapan partisipasi mereka sebagai penguatan peran politik perempuan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dimana masih banyak kepentingan perempuan dan ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan yang terjadi hingga saat ini seperti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dan pelecehan seksual, masalah kesehatan, diskriminasi diberbagai lingkup penghidupan, upah pekerja perempuan yang minim dan lebih rendah dari upah pekerja laki-laki, atau masalah kesejahteraan keluarga, kesehatan reproduksi dan masih banyak kepentingan perempuan lainnya yang menjadi isu-isu perempuan yang harus diupayakan secara politis sebagai masalah gender.

2.4 Kerangka Pikir

